

ISSN 1979-5394

# TITIK-TEMU

## JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Jl. Johari I No. 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240

Tel: (021) 726 2908 E-mail: titik.temu@yahoo.com

### Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

### Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

### Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

### Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •

Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •

Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •

Yudi Latif • Zainun Kamal

### Pewajah Sampul

Taqi Kanara

### Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan mana pun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

# TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

## DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Cuplikan dari Wirid Ibn 'Arabi	5-6
Senang Jadi Siswa	7-8
Pengantar	9-12

### SAJIAN KHUSUS

Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi <i>Nurcholish Madjid</i>	15-30
Nurcholish Madjid dan Akar Religius "Masyarakat Warga" <i>F. Budi Hardiman</i>	31-51
Masyarakat Madani: Bingkai Keadaban bagi Masyarakat Indonesia yang Demokratis-Pluralistik <i>Syamsul Arifin</i>	53-71

### ARTIKEL

Sistem Khilafah dalam Tradisi Islam <i>Ahmad Syafii Maarif</i>	75-87
Islam dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia: Persoalan Definisi dan Pelembagaan <i>Masdar Hilmy</i>	89-106

## DAFTAR ISI

Memaknai Keindonesiaan dalam Perspektif Politik Keragaman <i>Airlangga Pribadi</i>	107-125
Aliran-aliran Islam Kontemporer <i>Kautsar Azhari Noer</i>	127-151
Mencoba Menangkap Ruh al-Qur'an <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	153-176
Eksplorasi ke Dunia Fisik: Risiko-risiko dan Solusinya <i>Andy Setiawan</i>	177-183
Tuhan adalah Kedamaian <i>Baba Hari Daas</i>	185-188

## RESENSI BUKU

Islam Radikal: Mengubur Hidup-hidup Demokrasi <i>Okky Tirtoadhissoerjo</i>	191-195
---	---------

## MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	199-200
Ucapan Terima Kasih	201

# **ISLAM DAN TANTANGAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA**

## **PERSOALAN DEFINISI DAN PELEMBAGAAN**

*Masdar Hilmy*

### **Pendahuluan**

Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia tidak semudah membalik telapak tangan. Sebelum melakukan itu semua, persoalan pertama yang menghadang adalah persoalan definisi demokrasi. Di Barat sendiri demokrasi bukanlah konsep sekali jadi. Meminjam Gallie, demokrasi adalah *essentially contested concept*, sebuah konsep yang secara esensial diperebutkan pemaknaannya.<sup>1</sup> Di Indonesia konsep demokrasi masih belum menemukan bentuknya yang mapan. Perdebatan di ruang-ruang akademis masih didominasi oleh pergumulan konseptual di seputar apa dan bagaimana penerapan demokrasi. Akibatnya, upaya pelembagaan prinsip-prinsip demokrasi dalam struktur kenegaraan dan kemasyarakatan masih jauh dari sempurna.

Sebagai sebuah konsep universal, demokrasi tentu saja tidak memiliki batas-batas ruang dan waktu. Ia tidak memiliki kampung halaman atau masa kadaluwarsa hanya bagi kelompok masyarakat tertentu dan untuk kurun tertentu. Namun demikian, sebagai sebuah konsep dan praktik yang tidak terlahir di Indonesia, keha-

---

<sup>1</sup> W. B. Gallie, "Essentially Contested Concepts," *Proceedings of the Aristotelian Society* 56 (London: Harrison and Sons, 1956), h. 184.

diran demokrasi tetap menemui sejumlah kontroversi dan kendala. Liabilitas demokrasi, pada gilirannya, menjadi isu yang santer dibicarakan di negeri ini. Terlebih lagi jika perbincangan mengenai penerapan demokrasi dihadapkan pada kecenderungan kaum esensialis di kalangan ilmuwan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang menempatkan Islam sebagai agama yang dianggap oksimoron dengan demokrasi. Kalangan ini berasumsi bahwa Islam *by definition* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, Indonesia sebenarnya menghadapi persoalan ganda terkait dengan proses demokratisasi: persoalan otentisitas budaya-politik dan persoalan teologis.

## Pergumulan Definitif

Ketidakjelasan definisi demokrasi sebenarnya tidak terlepas dari persoalan ketidakjelasan identitas keindonesiaan. Identitas keindonesiaan menjadi lahan subur bagi idiosinkresi berbagai macam elemen dari luar, tak terkecuali konsep-konsep yang berasal dari Barat seperti demokrasi. Hal ini tidak berarti bahwa demokrasi adalah terma khas Barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan konsep kemanusiaan universal. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan pandangan kaum esensialis-eksepsionalis tentang keunikan budaya Indonesia karena budaya boleh jadi tidak bermusuhan dengan prinsip demokrasi atau *good governance*.

Persoalan apakah Indonesia reseptif atau tidak terhadap demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor budaya karena kita juga harus mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti konstelasi politik global. Yang pasti, sebuah perspektif teoretis monolitik tidak akan membantu dalam memahami arah perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang telah dinyatakan oleh Ghassan Salamé dalam bukunya *Democracy without Democrats?* bahwa mungkin tidak terdapat banyak kaum demokrat di dunia Muslim, tetapi tidak berarti bahwa

demokrasi bukanlah gagasan yang tidak relevan atau *viable* di dunia Muslim.<sup>2</sup>

Pada titik ini kita hanya bisa berasumsi bahwa Indonesia baru berada dalam masa transisi menuju demokrasi. Transisi semacam ini merupakan jalan yang berliku, seperti halnya banyak negara demokratis di dunia telah lalui.<sup>3</sup> Sekalipun demikian, sebuah pendekatan transisional pada dasarnya melihat kemungkinan demokrasi Indonesia hanya pada masalah waktu, dengan syarat bahwa Indonesia mampu melalui sejumlah tahapan penting.<sup>4</sup> Dilihat dari perspektif ini, diyakini bahwa Indonesia sekarang berada dalam periode transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratik. Sekalipun era baru telah membawa dampak destruktif seperti konflik etnik dan agama serta separatisme kedaerahan, transisi ke arah sebuah tatanan yang lebih demokratis telah pula membuka serangkaian kebebasan yang tidak pernah dialami sebelumnya,

<sup>2</sup> Ghassan Salamé, “Introduction: Where are the Democrats?,” dalam Ghassan Salamé, ed., *Democracy without Democrats?: The Renewal of Muslim Politics?* (London: I.B. Tauris, 1994), h. 3.

<sup>3</sup> Lihat, misalnya, R.W. Liddle, “Indonesia’s Democratic Transition: Playing by the Rules,” dalam A. Reynolds, ed., *The Architecture of Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 373-99; Damien Kingsbury dan Arief Budiman, ed., *Indonesia: the Uncertain Transition* (Adelaide: Crawford House Publishing, 2001); Abubakar E. Hara, “The Difficult Journey of Democratization in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 23/ 2 (Aug 2001): 307-26; Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, ed., *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (New York : Routledge, 2004).

<sup>4</sup> Menurut Dankwart Rustow, terdapat empat fase yang harus dilalui oleh sebuah negara sebelum sampai pada tahap demokrasi. Pertama, tahap kesatuan nasional, di mana konsep *nation-state* terbentuk. Kedua, fase perjuangan politik yang begitu intens sehingga mengancam persatuan nasional atau menyebabkan sebuah kelompok begitu kuat sehingga dapat mengancam perjalanan demokrasi. Ketiga, masa transisi pertama, sebuah momen historis di mana partai-partai politik melakukan kompromi-kompromi politik dan mengadopsi aturan-aturan demokrasi dengan memberikan kesempatan dalam kekuasaan (*power-sharing*). Keempat, terdapat transisi kedua atau fase pembiasaan di mana sebuah rezim demokrasi dapat berdiri dengan kokoh. Lebih jauh tentang transisi demokrasi, lihat Dankwart Rustow, “Transition to Democracy,” *Comparative Politics* 2 (April 1970): 337-63.

dengan memberikan bangsa Indonesia kebebasan untuk memilih pemimpinnya secara langsung untuk pertama kalinya sejak pemilu 1955 dan kebebasan untuk mengorganisasikan diri berdasar pada preferensinya.<sup>5</sup>

Jelaslah bahwa kejatuhan rezim otoriter Order Baru pada bulan Mei 1998 telah terbukti menjadi sebuah fajar kebangkitan yang menjanjikan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Liberalisasi politik melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung, yang memberikan akses lebih luas bagi partisipasi politik di tingkat akar rumput, merupakan salah satu bukti paling jelas dari dimulainya pelembagaan demokrasi di negeri ini.

Dilihat dari definisi “minimalis” tentang demokrasi [elektoral], Indonesia barangkali bisa diklasifikasikan sebagai negara demokratis, karena kemampuannya me-manage pemilihan langsung di tahun 2004 secara fair dan bebas.<sup>6</sup> Dilihat dari perspektif ini, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa mekanisme demokratis ini telah membidani kelahiran Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga.<sup>7</sup> Namun demikian, banyak yang kurang optimis tentang masa depan demokrasi di negeri ini. Pertanyaannya adalah: jenis demokrasi apa yang akan berkembang di Indonesia? Apakah lengsernya Soeharto dengan sendirinya menjamin kelahiran elemen-elemen atau lembaga-lembaga demokrasi? Atau, apakah demokrasi hanya akan dieksplorasi oleh kaum demagog guna meraih ambisi dan agenda politik mereka yang megalomaniak? Oleh karena perubahan sosial politik di negeri ini terbukti sangat lambat dalam merespon tuntutan demokratisasi di tingkat global, pertanyaan-pertanyaan di atas belum terjawab secara jelas.

<sup>5</sup> Baladas Ghoshal, “Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 26/3 (2004): 506-29.

<sup>6</sup> Kisah sukses Pemilu 2004 telah digambarkan sebagai “contoh yang bersinar” (*shining example*) dalam berita utama di surat kabar terkemuka Inggris, *The Economist*. Lihat “Leaders: Indonesia’s Shining Example,” *The Economist* 372 (July 10, 2004): 10.

<sup>7</sup> Olle Törnquist, “Dynamics of Indonesian Democratisation,” *Third World Quarterly* 21/3 (2000): 406.

Dalam konteks inilah pesimisme muncul. Pergantian rezim Orde Baru dengan sebuah tatanan pemerintahan yang lebih demokratis dilihat secara sinis sebagai “menuangkan anggur baru di botol yang lama.”<sup>8</sup> Perubahan mentalitas dalam politik Indonesia agaknya berjalan di tempat sehingga pergantian paradigma tersebut tidak mampu menumbuhkan benih-benih demokrasi dalam pengertiannya yang substansial. Kemunculan benih-benih demokrasi ini seringkali dianggap remeh oleh banyak kalangan sebagai sebuah *mission impossible*. Pada titik ini upaya menjelaskan wajah demokrasi di negeri ini pertama-tama harus diletakkan dalam kerangka upaya yang tidak terputus-putus dalam mendefinisikan demokrasi apa yang bisa dikembangkan dalam konteks Indonesia beserta seluruh kompleksitasnya.

Tentu saja beban terberat bagi Indonesia dalam mengembangkan konsep demokrasi terkait dengan rekam jejak pemerintahan otoriter masa lalu yang tidak mudah untuk dihilangkan. Namun begitu, yang lebih penting dalam konteks ini adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan keberadaan pandangan kulturalis bahwa Indonesia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengembangkan demokrasi hanya karena negeri ini terdiri dari komunitas Muslim terbesar di dunia. Volpi, misalnya, berdasar pada konstruk teoretis Diamond, melihat fenomena kemunculan demokrasi di dunia Muslim sebagai “pseudo-demokrasi,” sebuah realitas politik yang dia gambarkan sebagai “sebuah tatanan politik yang coba menyerupai demokrasi liberal tanpa upaya nyata untuk menjadi demokrasi liberal.”<sup>9</sup> Menurutnya, alasan di balik fenomena ini adalah bahwa “dengan meniru demokrasi kekuatan status quo

<sup>8</sup> Untuk sebuah pembicaraan ringkas tentang warisan Orde Baru pada era transisi lihat, misalnya, Vedi Hadiz, “Retrieving the Past for the Future? Indonesia and the New Order Legacy,” *Southeast Asian Journal of Social Science* 28/2 (2000): 10-33.

<sup>9</sup> Frédéric Volpi, “Pseudo-Democracy in the Muslim World,” *Third World Quarterly* 25/6 (2004): 1061-1078. Untuk lebih detail tentang teori “pseudo-democracy” Diamond lihat Larry Diamond, “Thinking about Hybrid Regimes,” *Journal of Democracy* 13/2 (2002): 21-35.

akan mampu meraih keuntungan domestik yang tidak bisa mereka dapatkan jika menjadi sebaliknya, yakni dengan menjadi demokrasi atau otoriter sepenuhnya.”<sup>10</sup>

Namun demikian, sementara dia mengakui adanya aspek-aspek instrumental yang memberikan kontribusi bagi terbentuknya pseudo-demokrasi seperti absennya institusi dan mekanisme demokrasi, Volpi berkesimpulan bahwa melihat demokratisasi di dunia Muslim dari perspektif ini hanya akan menjadi kontraproduktif. Hal ini terutama karena keberadaan sebuah dorongan universal bagi terciptanya demokrasi tanpa harus terjebak dalam demokrasi liberal Barat. Dalam pandangan Volpi, “pseudo-demokrasi” bukanlah sebuah versi demokrasi yang terdegradasi dari demokrasi liberal, tetapi harus diapresiasi sebagai batu pijakan menuju konstruksi sebuah demokrasi yang berbeda – baik republikan, teokratik maupun Islami.<sup>11</sup> Deskripsi teoretis tentang pseudo-demokrasi Indonesia berkelindan dengan apa yang oleh Larbi Sadiki disebut sebagai “façade demokrasi,” sebuah kondisi yang umum terjadi di kebanyakan dunia Muslim di mana demokrasi elektoral tidak disertai dengan keterlibatan sipil (*civic engagement*), penegakan hukum, pergantian kekuasaan, dan kebebasan berekspresi dan berkumpul.<sup>12</sup>

Atas dasar analisis komparatif terhadap kasus Turki dan Indonesia, Volpi menemukan bahwa salah satu faktor pendukung di balik rendahnya gerakan demokratisasi di dunia Muslim adalah kendala internal yang berupa ketertarikan masyarakatnya, baik di tingkat elit maupun akar rumput, pada diskursus dan praktik-praktik demokrasi non-liberal. Di Indonesia, lanjut dia, kemacetan paradigmatis ini dapat dilihat dengan jelas dalam keengganan pelajar sekolah menengah atas untuk mengalihkan ketaatannya

<sup>10</sup> Volpi, “Pseudo-Democracy in the Muslim World,” h. 1063.

<sup>11</sup> Volpi, “Pseudo-Democracy,” h. 1075.

<sup>12</sup> Larbi Sadiki, “Political Liberalization in Bin Ali’s Tunisia: Façade Democracy,” *Democratization* 9/4 (Winter 2002):122-141.

dari ideologi Demokrasi Pancasila ke demokrasi liberal.<sup>13</sup> Seperti diketahui bersama, Demokrasi Pancasila telah dimistikasi, dieksplorasi dan disalahgunakan sebagai alat ideologis oleh rezim Soeharto untuk mempertahankan kepentingan politiknya. Di bawah rezim Orde Baru, gerakan oposisi dianggap haram karena keputusan-keputusan politik dibuat atas dasar konsensus. Pemerintah yang berkuasa menerapkan kesadaran ideologis yang ketat pada masyarakat melalui hegemoni politik yang sistematis. Di bawah kondisi ini, kesatuan dan harmoni sosial dianggap jauh lebih penting daripada pluralisme dan akuntabilitas publik. Dalam sistem politik semacam ini seorang pimpinan diharapkan menjadi figur paternal yang menjaga tatanan politik, kesejahteraan ekonomi, stabilitas nasional, dan harmoni sosial.<sup>14</sup>

Persistensi ideologi status quo mengindikasikan keengganan Indonesia berjalan menuju sebuah demokrasi baru. Pencermatan terhadap persoalan dan kompleksitas yang menyertai dua pemilihan umum sebelum ini (1999 dan 2004) tampaknya membenarkan pesimisme ini. Vedi Hadiz, misalnya, berdasarkan pada pengamatan intens atas dua kota di Indonesia, Yogyakarta dan Medan, menyatakan bahwa seluruh jenis persoalan pemilihan umum seperti politik uang, pembelian suara, dan koalisi politik preman serta pemegang modal hitam bukanlah harga bagi demokrasi liberal, tetapi alasan kehadiran “sesuatu yang lain” – sejenis demokrasi non-liberal yang didorong oleh politik uang dan premanisme – yang sudah berurat-berakar, dan variasinya sudah bisa ditemukan di mana-mana, terutama dalam praktik politik lokal seperti Pemilihan Kepada Daerah.<sup>15</sup> Dia

<sup>13</sup> Mary Fearnley-Sander et. al., “Political Learning during Reformasi,” *Australian Journal of Political Science* 2/36 (2001): 325-346, seperti disebut oleh Volpi, “Pseudo-Democracy,” h. 1073.

<sup>14</sup> Tentang *Demokrasi Pancasila*, lihat, misalnya, Hans Antlöv, “Demokrasi Pancasila and the Future of Ideology in Indonesia,” dalam Hans Antlöv dan Tak-Wing Ngo, ed., *The Cultural Construction of Politics in Asia* (Richmond: Curzon Press, 2000), h. 203-22.

<sup>15</sup> Vedi R. Hadiz, “Reorganizing Political Power in Indonesia,” *The Pacific Review* 16/No. 4 (2003): 607.

menyebut jenis demokrasi yang tengah muncul di Indonesia sebagai “demokrasi illiberal,” sejenis demokrasi yang menyamar, dan bukan demokrasi itu sendiri.<sup>16</sup>

Kebalikan dari pandangan-pandangan di atas, sebuah pandangan lain yang agak optimis muncul dari Vali Nasr yang berargumen bahwa sesuatu yang disebut “Demokrasi Muslim” tengah bersemi sejak awal dekade 1990-an di sejumlah negara mayoritas Muslim – seluruhnya di luar dunia Arab – seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Turki.<sup>17</sup> Harus dicatat bahwa Vali Nasr merupakan ilmuwan yang meyakini tesis kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, sekalipun dia tidak memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana dan jenis demokrasi apa yang akan muncul di dunia Muslim. Namun begitu, dia berpendapat bahwa “Demokrasi Muslim” itu tidak didorong oleh sebuah pilar teologis abstrak yang rapi, yang mewakili sebuah sintesis otentik antara Islam dan demokrasi, tetapi lebih oleh sintesis pragmatis yang tengah muncul di banyak negara Muslim sebagai respon atas peluang dan tuntutan yang dihasilkan oleh demokrasi elektoral. Di bawah kondisi semacam ini partai-partai politik tidak memiliki pilihan kecuali membuat kompromi-kompromi pragmatis disertai dengan kebijakan politik membumi supaya mampu mendulang suara sebanyak-banyaknya.<sup>18</sup> Dalam kaitan ini, Nasr menggambarkan “Demokrasi Muslim” dalam konteks Indonesia sebagai *“less a platform and more a space wherein a number of parties are struggling to strike the right balance between secular politics and Muslim values.”*<sup>19</sup>

Alasan di balik suksesnya “Demokrasi Muslim,” kata Nasr, dapat dilihat pada pemilihan umum yang secara reguler digunakan sebagai mekanisme pemilihan pemimpin secara langsung yang memaksa

<sup>16</sup> Vedi R. Hadiz, “The Rise of Neo-Third Worldism? The Indonesian Trajectory and Consolidation of Illiberal Democracy,” *Third World Quarterly* 25/1 (2004): 55-71.

<sup>17</sup> Vali Nasr, “The Rise of ‘Muslim Democracy,’” *Journal of Democracy* 16/2 (April 2005): 13-27.

<sup>18</sup> Nasr, “The Rise of ‘Muslim Democracy,’” h.15.

<sup>19</sup> Nasr, “The Rise of ‘Muslim Democracy,’” h. 17.

partai-partai politik menuju pragmatisme dan mendorong partai-partai politik tersebut ke dalam upaya serius dalam merepresentasikan *interest* komunitas yang diwakilinya. Efek domino dari kontes semacam ini adalah gerakan menuju moderasi, yang berarti memenangkan median. Kompetisi demokratis menuntut dikatakan partai-partai Islam agar merangkul seluruh elemen pemilih, bukan saja mereka yang berbasis ideologis Islam, tetapi para pemilih sekuler, yang tersatukan di bawah *platform* dan koalisi politik yang lebih luas yang bersifat pragmatis. Kondisi semacam ini persis seperti yang digambarkan Nasr sebagai “*triumph of practice over theory and perhaps of the political over the Islamic.*”<sup>20</sup> Dia menambahkan bahwa masa depan politik Muslim agaknya akan menjadi milik politisi Muslim yang mampu mengemas sedemikian rupa nilai-nilai moral Islam, tetapi dalam kerangka *platform* politik demokratis. Akhirnya, diyakini bahwa hanya “Demokrasi Muslim” lah yang dapat menyediakan janji moderasi. Menghadapi dinamika “Demokrasi Muslim,” kaum Islamis mendapati diri mereka terjebak dalam pilihan yang sulit antara mengubah visi ideologis mereka atau tetap mengalami marginalisasi politik.

*World Values Survey* memberikan kategori yang berbeda terhadap demokrasi di Indonesia dengan sebutan “semi-demokrasi,” sebuah kategori yang dipakai untuk menggambarkan empat puluh tujuh negara di dunia yang telah mengalami demokrasi selama kurang lebih duapuluh tahun dan memiliki *rating Freedom House* 3,5 hingga 5,5.<sup>21</sup> *Freedom House* menyebut mereka sebagai “*partly-free*” (yang lain menggunakan istilah demokrasi “*transisional*” [*transitional*] atau “terkonsolidasi”) untuk mengindikasikan bahwa negara-negara ini tidak sepenuhnya menganut demokrasi secara penuh (*full-fledged democracy*).<sup>22</sup> Sekalipun temuan survai tersebut

<sup>20</sup> Nasr, “The Rise of ‘Muslim Democracy,’” h. 26.

<sup>21</sup> Lihat Pippa Norris and Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 52.

<sup>22</sup> Laporan tahunannya secara lengkap bisa diakses di situs *Freedom House* berikut: [www.freedomhouse.org](http://www.freedomhouse.org).

terbuka untuk diperdebatkan, memang sulit untuk membantah kenyataan lambannya proses demokratisasi di Indonesia mengingat kompleksnya tantangan dan hambatan yang dihadapi. Sekalipun demikian, survai tersebut menggunakan analisis empiris dengan berpijak pada prosedur dan standar yang dapat diukur secara ketat, bukan dengan kategori agama dalam pengertiannya yang normatif.

## Demokrasi Khas Indonesia: Mungkinkah?

Dalam konteks Indonesia barangkali sudah terlalu klise untuk berargumen bahwa Islam merupakan faktor terpenting dalam pembentukan demokrasi.<sup>23</sup> Dengan kata lain, argumen yang selalu diulang-ulang adalah bahwa Indonesia merupakan contoh sempurna dari harmonisnya Islam dan demokrasi.<sup>24</sup> Namun demikian, menyangkut persoalan sejauh mana dan bagaimana Islam telah menjadi faktor determinan dalam proses demokratisasi di negeri ini masih belum mendapat jawaban yang memuaskan. Orang biasanya merujuk pada keterbukaan politik elektoral yang ditunjukkan oleh keberhasilan pemilu 1999 dan 2004. Sekalipun demikian, kita perlu menguji secara lebih cermat apakah betul Islam berada di balik cerita sukses tersebut. Jika ya, pertanyaan berikut perlu juga dijawab: sejauh mana dan bagaimana Islam menjadi signifikan?

---

<sup>23</sup> Anders Uhlin, *Indonesia and the “Third Wave of Democratization”: The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World* (New York: St. Martin’s Press, 1997), h. 63; cf. Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co. KG, 1997); cf. Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance* (New York: Routledge, 1995).

<sup>24</sup> Azyumardi Azra, “Indonesian Islam, Election Politics and Beyond,” *NIAS Nytt* 4 (Dec 2004): 12-14; cf. Abdurrahman Wahid, “Indonesia’s Mild Secularism,” *SAIS Review* 21/2 (Summer-Fall 2001): 25-7.

Salah satu argumen yang seringkali dirujuk sebagai justifikasi teoretis bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia adalah watak dasar Islam di negeri ini yang distingtif, yang seringkali dikatakan berbeda dari Islam Timur Tengah atau di negara-negara Arab. Islam Indonesia telah lama menikmati reputasinya sebagai Islam pluralis dan toleran. Hal lain bisa dikatakan *heterodox*, karena pola persebarannya tidak mengikuti pola penaklukan militer tetapi melalui jalur perdagangan dan budaya. Islam terbukti menjadi agama yang hidup berdampingan dengan elemen-elemen budaya pra-Islam seperti Hindu dan Budha. Islam datang ke Indonesia sebagai sebuah kekuatan yang mengonversikan iman, dan bukan sebagai kekuatan militer penakluk, seperti yang terjadi di dataran atau negara lain. Dalam kaitan ini apa yang menjadikan Islam diterima secara luas dalam waktu cepat oleh masyarakat pribumi adalah prinsip egalitarianismnya. Merle C. Ricklefs berpendapat bahwa “*The Islam of Indonesia has been full of heterodoxy and heresy, a fact which later encouraged major reformist movements in the nineteenth and twentieth centuries.*”<sup>25</sup>

Adalah watak dasar heterodoks Islam semacam inilah yang membantu melahirkan sebuah “*local genius*” yang cenderung memperlihatkan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi beragam budaya dari luar. Karakter “pluricentric” ini, meminjam Hefner, berfungsi sebagai sebuah basis budaya yang kuat bagi pengembangan pola budaya dan politik kaum Muslim.<sup>26</sup> Ia telah berperan sebagai sumber kekuatan bagi Islam untuk memainkan perannya sebagai *interlocutor* dalam proses dialog budaya antara elemen budaya lokal dan elemen dari luar, termasuk gagasan *civil society* dan demokrasi, sekalipun tensi budaya dapat dilihat di sana-sini.

Tidak disangkal lagi bahwa Hefner merupakan ilmuwan yang mengaitkan antara gagasan demokrasi di Indonesia dengan budaya

<sup>25</sup> Merle C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* (Stanford, California: Stanford University Press, 2001), h. 14.

<sup>26</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000), h. 14.

politiknya.<sup>27</sup> Dengan mengkritisi mata rantai Weberian tentang demokrasi liberal Barat, Hefner merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh Robert Putnam<sup>28</sup> dan Alexis de Tocqueville<sup>29</sup> di Italia dan Amerika Serikat untuk digunakan sebagai titik berangkat dalam mengungkapkan teori-teori demokrasi di Indonesia. Sementara Hefner mengakui kesederhanaan penjelasan Putnam tentang apa yang menyebabkan bekerjanya demokrasi dan meggambarkannya sebagai “tidak utuh” secara inheren, dia masih menggunakan penjelasan teoretis mereka untuk melacak modal sosial-budaya demokrasi di Indonesia. Dalam pandangannya, Indonesia secara umum dan masyarakat Muslim secara khusus telah dikaruniai dengan melimpahnya sumber-sumber sipil (*civil resources*) di atas mana budaya demokrasi dapat didirikan.<sup>30</sup> Namun demikian, Indonesia dinilai telah gagal memanfaatkannya sebagai basis yang kuat bagi pembangunan kultur demokrasi modern yang disebabkan oleh kegagalan elit politik melakukan hal tersebut. Ketimbang melakukan konsolidasi demokrasi, mereka malah menyalahgunakan dan memanipulasi nilai-nilai demokrasi demi kepentingan politik jangka pendek.<sup>31</sup>

Jadi jelaslah, bagi Hefner, melacak asal-usul budaya dan sejarah demokrasi dalam sebuah masyarakat berarti melacak asal-usul budaya sipilnya (*civic culture*). Dia berpendapat bahwa proses demokratisasi tergantung bukan saja pada peran negara – yakni pemilu rutin dan institusi formal – tetapi juga pada budaya dan organisasi dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan menyandarkan pada konstruksi teoretis Putnam, dia berasumsi bahwa pengembangan demokrasi akan banyak ditentukan oleh sejauhmana sebuah masyarakat memiliki budaya kesukarelaan (*voluntarism*), ikatan-

<sup>27</sup> Hefner, *Civil Islam*, khusunya h. 21- 26.

<sup>28</sup> Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993).

<sup>29</sup> Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, terj. George Lawrence, ed. J.P. Mayer 1 (Garden City, NY: Doubleday, 1969).

<sup>30</sup> Hefner, *Civil Islam*, h. 25.

<sup>31</sup> Hefner, *Civil Islam*, h. 25.

ikatan independen, dan perimbangan kekuasaan antara negara, masyarakat dan kekuatan masyarakat madani dapat diperankan dengan baik.<sup>32</sup> Tetapi aktivitas ini masih belum cukup jika mereka bekerja dalam ruang-ruang yang saling terisolasi. Demokrasi pada akhirnya mensyaratkan budaya publik yang interaktif guna memperemosikan kebiasaan-kebiasaan universal akan pentingnya partisipasi publik dan toleransi.

Barangkali di tengah interaksi yang kompleks antara negara dan masyarakat semacam inilah Islam datang sebagai *intervening variable* dalam proses demokratisasi yang panjang itu. Hefner tampaknya meyakini bahwa proses demokratisasi di Indonesia akan mengambil bentuk dan jalan berbeda dari proses yang sama di sejumlah negara demokrasi di belahan dunia lain, terutama di Barat, di mana demokrasi didirikan di atas prinsip pemisahan antara Gereja dan negara. Mengambil pelajaran dari paradigma aksiomatis “*there is no one-size-fits-all democracy*,” dia berpendapat bahwa demokratisasi di Indonesia tidak akan terpisah dari keterlibatan dan peran Islam sebagai sebuah entitas budaya yang dominan.<sup>33</sup> Dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, Hefner melihat sebuah upaya memperbarui paradigma lama bernegara dengan semangat baru dari Islam publik.<sup>34</sup> Sekalipun Indonesia telah didera tigapuluhan tahun rezim otoriter, dia mengatakan bahwa,

Indonesia today is a witness to a remarkable effort to recover and amplify a Muslim and Indonesian culture of tolerance, equality and civility. The proponents of civil Islam are a key part of this renaissance. Civil Muslims renounce the mythology of an Islamic state. Rather than relegating Islam to the realm of the private, however, they insist that there is a middle path

<sup>32</sup> Hefner, *Civil Islam*, h. 215.

<sup>33</sup> Hefner, *Civil Islam*, h. 216-17.

<sup>34</sup> Pemahaman Hefner tentang Public Islam banyak diinspirasi oleh Public Religion-nya Casanova. Lihat, José Casanova, *Public Religions in the Modern World* (Chicago: University of Chicago Press, 1994).

between liberalism's privatization and conservative Islam's bully state. The path passes by way of public religion that makes itself heard through independent associations, spirited public dialogue, and the demonstrated decency of believers.<sup>35</sup>

Maksud Hefner untuk menunjukkan kekhasan demokrasi Indonesia bisa dipahami mengingat diskursus dan praktik demokrasi di luar belahan negara-negara Barat mungkin mengambil bentuk dan jalan berbeda-beda. Dia hendak mengafirmasi bahwa demokrasi liberal ala Barat bukanlah satu-satunya tafsir *legitimate* dalam berdemokrasi. Yang jelas adalah tidak terdapat kejanggalan peradaban (*civilizational malady*) atau semacamnya di Indonesia dalam menerima gagasan demokrasi.<sup>36</sup>

Dilihat dari perspektif kultural, “*civil Islam*” Hefner memang merupakan terobosan teoretik yang cukup bermanfaat dalam memahami demokrasi Indonesia. Dengan banyak menyandarkan diri pada kulturalisme Putnamian dan de Tocquevillian, Hefner meyakini bahwa Indonesia telah sampai pada level demokrasi sesungguhnya hanya karena negeri ini memiliki modalitas budaya yang berlimpah, sama seperti yang dimiliki oleh Italia dan Amerika Serikat. Apa yang dirasakan absen dalam karya Hefner barangkali adalah sebuah pengamatan secara lebih dekat atas signifikansi Islam dalam memola *good governance* atau demokrasi pada level negara. Pengatribusian demokrasi hanya pada keterlibatan publik masyarakat secara luas dalam membangun budaya sipil seperti pluralisme, toleransi, dan *social trust* belumlah cukup untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya.

Modalitas sosial yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu tidak secara otomatis akan mengantarkan masyarakat tersebut pada demokratisasi pada level negara. Agar sebuah masyarakat dapat mendemokratiskan diri, demokrasi harus diterapkan pertama

<sup>35</sup> Hefner, *Civil Islam*, h. 18.

<sup>36</sup> Hefner, “Public Islam and the Problem of Democratization,” *Sociology of Religion* 62/4 (2001) :491-514.

kali pada level struktur kenegaraan, baru setelah itu di tingkat sosial-masyarakat. Demokrasi membutuhkan penegakan hukum dan pemberantasan praktik-praktik politik koruptif secara simultan dan konsisten. Memberantas korupsi dan penegakan hukum merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi.<sup>37</sup> Karena itulah konstruk teoretis “*civil Islam*” Hefner akan kesulitan menjawab fenomena merebaknya korupsi dan rendahnya komitmen ketataan hukum di kalangan masyarakat Indonesia yang pada gilirannya bisa mengancam perjalanan demokrasi di negeri ini di masa mendatang.

## Penutup

Tantangan terbesar proses demokratisasi di Indonesia, dengan demikian, berkisar pada pergumulan definitif di seputar apa makna demokrasi bagi bangsa Indonesia dan bagaimana proses pelembagaannya. Proses demokratisasi di negeri ini tidak akan pernah tuntas sepanjang persoalan definitif ini masih mengambang. Harus dijawab terlebih dahulu, misalnya, pertanyaan seperti: jika demokrasi di Barat diterjemahkan melalui pemisahan agama dari ruang publik (negara), apakah hal yang sama juga berlaku di tengah masyarakat kita. Jika standardisasi yang digunakan untuk mengukur derajat demokratisasi di Indonesia adalah definisi minimum demokrasi dengan indikator pemilu, maka Indonesia bisa diklasifikasikan sebagai demokrasi. Tetapi persoalannya adalah bahwa demokrasi bukan hanya pemilu tetapi juga menuntut adanya kebebasan berpendapat dan beragama, atas taat hukum dan

---

<sup>37</sup> Mengenai catatan tentang apa arti korupsi bagi demokrasi, lihat, misalnya, Mark E. Warren, “What Does a Corruption Mean in a Democracy?,” *American Journal of Political Science* 48/2 (April 2004): 328-43. Tentang penegakan hukum, lihat, misalnya, Guillermo O’ Donnell, “The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters,” *Journal of Democracy* 15/4 (October 2004): 32-46.

penegakan hukum, dan semacamnya yang harus dijalankan secara sadar dan berkelanjutan.

Persoalannya adalah bahwa proses demokratisasi semakin kompleks dengan masuknya faktor agama dalam ranah publik. Agama seringkali dipakai sebagai justifikasi pihak-pihak tertentu untuk menghambat laju demokratisasi demi meraih *vested interests* semata. Dalam ruang-ruang demokrasi memang tidak ada salahnya agama dibawa ke dalam struktur negara karena demokrasi berarti memberi ruang kepada siapa pun, termasuk terhadap musuh kita, untuk berekspresi. Persoalannya adalah bahwa agama menjadi *entry-point* yang paling mudah sebagai *mass mobilising factor* yang justru bisa mengancam laju demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, perdebatan menyangkut peran agama dalam ruang publik juga harus dituntaskan sebelum kita melangkah dengan proyek demokratisasi.❖

## Daftar Rujukan

- Abdillah, Masykuri. *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy*. Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co. KG, 1997.
- Antlöv, Hans. "Demokrasi Pancasila and the Future of Ideology in Indonesia." Dalam Hans Antlöv, Hans, dan Tak-Wing Ngo, ed. *The Cultural Construction of Politics in Asia*. Richmond: Curzon Press, 2000.
- Azra, Azyumardi. "Indonesian Islam, Election Politics and Beyond," *NIAS Nytt* 4 (December 2004): 12-14.
- Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- de Tocqueville, Alexis. *Democracy in America*. Terj. George Lawrence, ed. J.P. Mayer, vol. 1. Garden City, NY: Doubleday, 1969.
- Diamond, Larry. "Thinking about Hybrid Regimes." *Journal of Democracy* 13/2 (2002): 21-35.
- Fearnley-Sander, Mary, et. al. "Political Learning during Reformasi." *Australian Journal of Political Science* 2/36 (2001): 325-346. As cited by Volpi. "Pseudo-Democracy in the Muslim World," p. 1073.

- Gallie, W. B. "Essentially Contested Concepts." *Proceedings of the Aristotelian Society* 56. London: Harrison and Sons, 1956.
- Ghoshal, Baladas. "Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 26/3 (2004): 506-29.
- Hadiz, Vedi R. "Reorganizing Political Power in Indonesia." *The Pacific Review* 16/4 (2003): 607.
- Hadiz, Vedi R. "The Rise of Neo-Third Worldism? The Indonesian Trajectory and Consolidation of Illiberal Democracy." *Third World Quarterly* 25/1 (2004) :55-71.
- Hadiz, Vedi R. "Retrieving the Past for the Future? Indonesia and the New Order Legacy." *Southeast Asian Journal of Social Science* 28/2 (2000): 10-33.
- Hara, Abubakar E. "The Difficult Journey of Democratization in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 23/2 (Aug 2001): 307-26.
- Hefner, Robert W. "Public Islam and the Problem of Democratization." *Sociology of Religion* 62/ 4 (2001): 491-514.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000.
- Kingsbury, Damien dan Arief Budiman, ed. *Indonesia: the Uncertain Transition*. Adelaide: Crawford House Publishing, 2001.
- "Leaders: Indonesia's Shining Example." *The Economist* 372 (July 10, 2004): 10.
- Liddle, R.W. "Indonesia's Democratic Transition: Playing by the Rules." Dalam A. Reynolds, ed. *The Architecture of Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Nasr, Vali. "The Rise of 'Muslim Democracy'." *Journal of Democracy* 16/2 (April 2005): 13-27.
- Norris, Pippa, dan Ronald Inglehart. *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- O' Donnell, Guillermo. "The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters." *Journal of Democracy* 15/4 (October 2004): 32-46.
- Putnam, Robert D., at al. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

- Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. New York: Routledge, 1995.
- Ricklefs, Merle C. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Stanford, California: Stanford University Press, 2001.
- Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz, ed. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. New York: Routledge, 2004.
- Rustow, Dankwart. "Transition to Democracy." *Comparative Politics* 2 (April 1970): 337-63.
- Sadiki, Larbi. "Political Liberalization in Bin Ali's Tunisia: Façade Democracy." *Democratization* 9/4 (Winter 2002): 122-141.
- Salamé, Ghassan. "Introduction: Where are the Democrats?" Dalam Ghassan Salamé, ed. *Democracy without Democrats: The Renewal of Muslim Politics*? London: I.B. Tauris, 1995.
- Törnquist, Olle. "Dynamics of Indonesian Democratisation." *Third World Quarterly* 21/3 (2000): 406.
- Uhlen, Anders. *Indonesia and the "Third Wave of Democratization": The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*. New York: St. Martin's Press, 1997.
- Volpi, Frédéric. "Pseudo-Democracy in the Muslim World." *Third World Quarterly* 25/6 (2004): 1061-1078.
- Wahid, Abdurrahman. "Indonesia's Mild Secularism." *SAIS Review* 21/2 (Summer-Fall 2001): p. 25-27.
- Warren, Mark E. "What Does a Corruption Mean in a Democracy?" *American Journal of Political Science* 48/2 (April 2004): 328-43.
- [www.freedomhouse.org](http://www.freedomhouse.org).

**Masdar Hilmy** adalah dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, dan alumnus The University of Melbourne, Australia.